

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kinerja keuangan adalah gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan (Fahmi, 2014). Keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya dapat dilihat dari kinerja keuangannya. Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan menggunakan berbagai macam cara yang berbeda dan dengan menerapkan berbagai macam metode. Metode yang umumnya digunakan adalah rasio profitabilitas (Niresh & Velampy, 2014). Dimana tingkat profitabilitas menggambarkan kinerja keuangan perusahaan yang dilihat dari kemampuan perusahaan menghasilkan *profit*.

Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu hasil yang memanfaatkan sumber daya. Laba merupakan parameter dalam pengukuran kinerja keuangan. Laba sangat diperlukan oleh suatu perusahaan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Laba akan diperoleh jika perusahaan terus melakukan kegiatan operasionalnya. Kegiatan operasional perusahaan akan dicapai jika mempunyai sumber daya yang berpengetahuan dan berkompentensi dalam bidangnya. Laba akan memberikan sinyal positif bagi prospek perusahaan di masa depan tentang

kinerja keuangan perusahaan sehingga dengan adanya pertumbuhan laba yang terus meningkat, maka akan memberikan sinyal positif bagi kinerja keuangan perusahaan. Selain untuk memperoleh laba, tujuan yang paling penting bagi perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan harga saham perusahaan.

Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat, melalui proses intermediasi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana maupun penyediaan jasa keuangan lainnya, berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Ketika sistem perbankan konvensional sempoyongan karena krisis moneter dan memerlukan biaya yang begitu besar untuk mempertahankannya, perbankan syariah justru mampu menyelamatkan sebagian ekonomi umat. Manajemen yang berada dalam perbankan syariah harus mempunyai sistem memiliki sisi strategi yang kuat dan mengambil suatu kebijakan yang baik dalam tata kelola pada perbankan syariah tersebut. Dibutuhkannya tata kelola perusahaan yang baik "*Good Corporate Governance (GCG)*" diharapkan membangun pasar yang efisien, dikelola secara transparan dan taat pada hukum perundang-undangan negara Indonesia (Zarkasyi, 2008). Untuk menarik nasabah asing, perbankan syariah diharuskan memiliki tata kelola yang baik, jika tidak memiliki tata kelola yang baik maka kesejahteraan perusahaan akan menurun dan tidak punya harapan lagi.

"*Good Corporate Governance (GCG)*" digunakan dengan tujuan untuk menambah nilai kesejahteraan, memberi nilai kemakmuran dan

diharapkan mengatasi resiko-resiko yang timbul pada tata kelola manajemen. Sangat diperlukannya sistem “*Good Corporate Governance (GCG)*” agar dapat senantiasa setiap saat memantau kebijakan yang digunakan oleh suatu lembaga atau perusahaan agar selalu terkonsep dengan baik dan tepat (Sutedi, 2012). *Good Corporate Governance* adalah tatanan mekanisme yang dimiliki oleh lembaga atau perusahaan sebagai tolak ukur untuk mentata kelola sumber daya yang berada pada lingkup internal maupun eksternal dilakukan dengan efektif dan tepat dengan berlandaskan prinsip-prinsip dari GCG tersebut, yaitu keterbukaan, dapat dipertanggungjawabkan, keadilan, independen dan akuntabilitas (Oktafia, 2017).

Masalah *corporate governance* muncul karena terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Pemisahan ini didasarkan pada *agency theory* yang dalam hal ini manajemen cenderung akan meningkatkan keuntungan pribadinya daripada tujuan perusahaan. Selain memiliki kinerja keuangan yang baik perusahaan juga diharapkan memiliki tata kelola yang baik. Peningkatan kinerja keuangan perusahaan ini dapat tercapai apabila ada kerja sama antara manajemen perusahaan dengan pihak lain yang meliputi *shareholder* maupun *stakeholder* dalam membuat keputusan-keputusan keuangan dengan tujuan memaksimalkan modal kerja yang dimiliki.

Apabila tindakan antara manajer dengan pihak lain tersebut berjalan sesuai, maka masalah diantara kedua pihak tersebut tidak akan

terjadi. Dalam kenyataannya penyatuan kepentingan kedua pihak tersebut sering kali menimbulkan masalah. Adanya masalah diantara manajer dan pemegang saham disebut masalah agensi (*agency problem*). Karena adanya *agency problem* tersebut akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan keuangan perusahaan, yaitu meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Untuk itu diperlukan sebuah kontrol dari pihak luar dimana peran *monitoring* dan pengawasan yang baik akan mengarahkan tujuan yang seharusnya. Dalam teori keagenan, agen yang *risk-adverse* dan yang cenderung mementingkan dirinya sendiri akan mengalokasikan *resources* (berinvestasi) yang tidak meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme *corporate governance* utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan. Dimana manajer berperan sekaligus menjadi pemegang saham perusahaan. Adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan akan menyelaraskan tujuan antara manajer dan pemegang saham sehingga dapat meningkatkan harga saham dan nilai perusahaan (Weston and Copeland, 1999). Kepemilikan saham oleh manajemen akan mengurangi terjadinya masalah kepentingan antara pemilik (*principal*) dengan manajer (*agent*) perusahaan sehingga harga saham perusahaan akan meningkat.

Dalam laporan keuangan, keadaan ini dinyatakan oleh berapa besarnya presentase kepemilikan oleh manajer. Karena cukup tersedianya

informasi mengenai besarnya presentase kepemilikan saham manajerial, maka informasi ini harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Manajer yang sekaligus berperan sebagai pemegang saham akan berusaha bekerja secara optimal dan tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi. Semakin besar saham yang dimiliki oleh manajer maka semakin memotivasi kinerja mereka untuk meningkatkan nilai saham perusahaan. Peningkatan kepemilikan manajerial membantu untuk menghubungkan kepentingan internal perusahaan dan pemegang saham serta mengarahkan ke arah yang lebih baik dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Selain kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional juga merupakan mekanisme dalam meningkatkan kinerja keuangan. Kepemilikan institusional adalah merupakan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan persentase (Nabela, 2012). Dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat mencegah perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer serta dapat meminimalisir tingkat penyelewengan yang dilakukan pihak manajemen yang akan menurunkan laba perusahaan.

Menurut Baridwan (2004), kepemilikan institusional sebagai proporsi saham yang dimiliki oleh suatu lembaga atau institusi pada akhir tahun. Kehadiran kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kepemilikan institusional juga

memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. *Monitoring* tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar.

Tingkat saham institusional yang tinggi akan menghasilkan upaya-upaya pengawasan yang lebih intensif sehingga dapat membatasi perilaku *opportunistic* manajer, yaitu manajer melaporkan laba secara oportunis untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Adanya kepemilikan institusional menyebabkan perilaku manajer lebih terkontrol dengan baik oleh pihak pemegang saham eksternal (Tjeleni, 2013).

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah yang tepat dari anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya. Menurut pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia, jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Jumlah anggota dewan komisaris juga tergantung dari jenis keahlian yang dimiliki dari suatu bidang industri. Kemampuan dewan komisaris dalam mengawasi dan mengatasi masalah yang muncul sangat diperlukan.

Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Komisaris independen bertujuan

untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait (Susiana & Herawaty, 2007). Dalam penelitian Hardikasari (2011) menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris independen lebih besar maka dapat mendorong dewan komisaris untuk bertindak secara tepat dan mampu melindungi seluruh *stakeholder* perusahaan. Hal ini akan berhubungan dengan semakin objektifnya pengakuan beban atau laba yang dimiliki perusahaan.

Komite audit juga merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah perusahaan, terutama dalam tata kelola perusahaan (GCG). Komite audit adalah suatu badan komite yang dibentuk oleh jajaran dewan komisaris dengan tujuan untuk membantu melakukan pengecekan, pemeriksaan, dan penelitian yang dianggap penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran direksi dalam pengelolaan perusahaan tersebut. Keberadaan komite audit di Indonesia dimulai sejak 2001 sesuai dengan Surat Edaran Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) yang saat ini telah berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Komite Audit membantu tugas dewan komisaris dari sisi pengawasan (*controlling*) dan bertanggung jawab untuk menjaga akses komunikasi antara para pemangku kepentingan (Dewan Komisaris, Direksi, Manajer Keuangan, Audit Internal, dan Akuntan Independen). Komite audit juga membantu dalam hal pengawasan terhadap direksi dan membuat rekomendasi atas suatu tindakan kepada seluruh jajaran direksi. Komite audit berperan

penting dalam membantu direksi untuk mencapai *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik.

Saat ini *market share* bank syariah di Indonesia berkisar 5% dari total aset bank secara nasional. Jumlah nasabah bank syariah saat ini masih di bawah 10 juta orang, sehingga potensi peningkatan nasabah perbankan syariah masih sangat besar mengingat jumlah penduduk usia produktif Indonesia yang terus bertambah. Hingga Desember 2016 jumlah industri Bank Umum Syariah (BUS) tercatat sebanyak 13 Bank, jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 21 Bank, BPRS sebanyak 164 Bank, dan total pekerja mencapai 4.372 orang. Adapun total aset (khusus BUS dan UUS) adalah sebesar Rp 356.504 triliun, pembiayaan sebesar Rp 234.643 triliun. (www.bi.go.id)

Kinerja perbankan syariah di Tanah Air sepanjang sembilan bulan pada tahun ini cenderung semakin melemah, terimbas oleh kondisi ketidakstabilan ekonomi global dan domestik. Berdasarkan data kinerja keuangan periode 9 bulan pada 10 bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) yang dirangkum Bisnis, lima di antaranya terus menunjukkan perlambatan pertumbuhan laba. Di dalamnya termasuk PT Bank Mandiri Syariah dan PT Bank BNI Syariah. Sementara itu, empat bank syariah lainnya masih terus membukukan penurunan laba dari kuartal I/2019 hingga kuartal III/2019. Hanya satu bank yang masih konsisten membukukan peningkatan pertumbuhan laba sepanjang tahun 2019, yaitu PT Bank Tabungan Pensiun Negara Syariah Tbk.

Positifnya pertumbuhan pembiayaan dan efisiensi bisnis menjadi kunci kinerja perseroan. Adapun, PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah masih berhasil menjadi penopang bagi kinerja induk usahanya hingga September 2019. Namun, pertumbuhan kinerjanya cenderung melambat. Perolehan laba Bank Mandiri Syariah kuartal III/2019 didorong oleh pertumbuhan pembiayaan, perbaikan kualitas, peningkatan efisiensi, dan transformasi digital layanan BSM. Sementara itu, laba BNI Syariah banyak didorong oleh pembiayaan yang berkualitas, efisiensi operasional, dan ekspansi dana murah atau CASA (*current account saving account*). Selain itu, minat nasabah perseroan terhadap produk akad wadiah diklaim semakin tinggi. Hal ini membuat beban bagi hasil menurun. Perlambatan yang lebih dalam dialami BCA Syariah. Bank syariah ini belum mampu menembus level pertumbuhan dua digit.

Sementara itu, bank syariah yang masih mencatat penurunan laba yakni PT Bank BRI Syariah Tbk. Penurunan laba perseroan paling tajam dibandingkan perbankan syariah lainnya per September 2019, yakni anjlok 62,6% yoy menjadi Rp56,46 miliar. Hal ini utamanya disebabkan oleh beban operasional lainnya yang naik 15,0% yoy menjadi Rp1,7 triliun. Berdasarkan laporan publikasi bank, beban operasional tersebut naik akibat kerugian penurunan nilai aset keuangan (*impairment*). Pembiayaan dari piutang naik 191,2% yoy menjadi Rp162,07 miliar, sedangkan pembiayaan bagi hasil tumbuh 101,2% yoy menjadi Rp173,95 miliar.

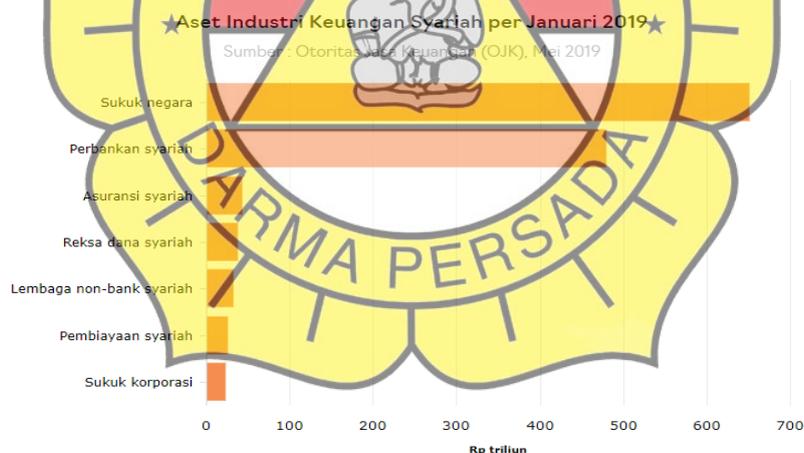
Hingga September 2019 BRI Syariah masih membukukan NPF di atas industri. NPF kotor bank berada pada posisi 4,45%, sedangkan NPF bersih 3,97%. Kendati tinggi, realisasi triwulan ketiga 2019 tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kinerja bisnis utama BRI Syariah sejatinya cukup baik. Pendapatan penyaluran dana naik 8,2% yoy menjadi Rp2,5 triliun, sedangkan bagi hasil untuk pemilik dana investasi turun 0,2% yoy menjadi Rp913,8 miliar. Capaian itu pun mendorong pendapatan setelah distribusi bagi hasil naik 13,8% yoy menjadi Rp1,6 triliun. Hal ini seiring dengan perbaikan pada rasio net imbalan (NI) dari 5,28% pada September tahun lalu menjadi 5,58% pada bulan yang sama tahun ini. (www.financial.bisnis.com)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan industri keuangan syariah nasional hingga Mei 2019 sebesar 11,25% melambat dibanding posisi akhir 2018 sebesar 13,98%. Regulator keuangan itu merinci nilai pasar modal syariah hingga periode yang sama mencapai Rp727,08 triliun, INKB sebesar Rp100,49 triliun, dan total aset perbankan sebesar Rp484,62 triliun. Adapun pangsa pasar perbankan syariah saat ini masih mencapai 5,85% dari total industri perbankan.

Berdasarkan data OJK, hingga kini terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS). Dari jumlah tersebut, tujuh BUS berasal dari konversi bank umum, sedangkan enam BUS merupakan hasil *spin off*. Selain itu, masih terdapat 20 Unit Usaha Syariah (UUS), yang terdiri dari 13 UUS

Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan tujuh UUS Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) yang akan menentukan sikap konversi atau *spin off*.

Konversi lebih bergantung kepada kebijakan politik pemerintah daerah sebagai pemilik. Sedangkan *spin off* memiliki beberapa faktor yang harus menjadi bahan pertimbangan, yaitu SDM, sistem teknologi, dan faktor permodalan sangat signifikan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berlaku sejak 16 Juli 2008 silam, UUS harus memiliki nilai aset sekitar 50% dari aset entitas induk saat melakukan *spin off* atau setidaknya melepaskan diri setelah 15 tahun sejak berlakunya UU tersebut. (www.katadata.co.id)



Industri keuangan syariah di Indonesia terus berkembang. Total aset industri keuangan syariah menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencapai Rp 1.291,48 triliun per Januari 2019. Nilai aset ini meningkat sebesar Rp 25,5 triliun dibandingkan dengan posisi September 2018 sebesar Rp 1.265,97 triliun. Aset industri keuangan syariah didominasi

oleh sukuk negara sebesar Rp 651,29 triliun atau 50,4%. Di posisi kedua, aset perbankan syariah sebesar 479,17 triliun atau 37,1%. Di posisi ketiga, aset asuransi syariah mencapai Rp 43,12 triliun atau 3,34%.

Di posisi keempat ada reksa dana syariah senilai Rp 37,3 triliun atau 2,89%. Disusul oleh aset lembaga non-bank syariah Rp 32,43 triliun atau 2,5%, pembiayaan syariah Rp 25,61 triliun atau 1,99%, dan sukuk korporasi Rp 22,56 triliun atau 1,78%. Perhitungan aset industri keuangan syariah ini tidak memasukkan kapitalisasi pasar saham-saham syariah senilai Rp 3.861,7 triliun. (www.databoks.katadata.co.id)

Penelitian terkait kinerja keuangan telah banyak dilakukan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Darwis (2009), Hapsoro (2008), serta Bayrakdaroglu, *et al.* (2012). Menurut Darwis (2009) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan karena kepemilikan saham oleh manajer pada perusahaan proporsinya masih sangat kecil sehingga dimungkinkan manajer belum merasakan manfaat dari kepemilikan tersebut. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali Salman *et al* (2017) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Fadillah (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hal ini selaras dengan penelitian Agus Santoso (2017), Aprianingsih (2016). Berbeda dengan penelitian Rachman (2014) dan

Haryono (2017) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara kepemilikan institusional dengan kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari (2016), menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Didalam menentukan komposisi dewan komisaris diperlukan alat ukur yaitu jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah anggota dewan komisaris. Komisaris independen bertindak sebagai wakil dari *stakeholder* untuk mengawasi jalannya kegiatan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Fadillah (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2011) berdasarkan hasil penelitiannya menunjukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2011) juga menunjukan hasil dengan variabel komite audit bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Riniati (2015) yang menunjukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang sudah dipaparkan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Analisis Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja***

Keuangan Perbankan Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2015-2019.”

1.2 Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemikiran pada latar belakang di atas maka identifikasi masalah yang dapat ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis untuk melihat perkembangan perusahaan dalam melaksanakan keuangannya apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan keuangan secara baik dan benar.
2. Peningkatan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.
3. Para pemangku kepentingan juga berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komite audit, dan dewan komisaris independen.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini agar tidak meluas, maka diberi batasan agar penelitian mendapatkan temuan yang terfokus dan mendalami permasalahan serta dapat menghindari penafsiran yang berbeda pada konsep dalam penelitian. Penulis hanya membatasi masalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan manajerial diukur berdasarkan kepemilikan saham yang dimiliki oleh kepemilikan manajerial dari total saham yang beredar.
2. Kepemilikan institusional diukur berdasarkan kepemilikan saham yang dimiliki oleh kepemilikan institusi dari total saham yang beredar.
3. Ukuran dewan komisaris diukur berdasarkan jumlah keseluruhan dewan komisaris pada suatu perusahaan.
4. Komite audit diukur berdasarkan jumlah keseluruhan anggota komite audit pada suatu perusahaan.
5. Dewan komisaris independen diukur berdasarkan jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris.
6. Kinerja keuangan diukur berdasarkan *Return On Asset* (ROA).

Masalah tersebut dipilih karena merupakan masalah yang relevan dan berhubungan dengan penelitian ini. Perusahaan yang diteliti, merupakan perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2015-2019.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015-2019?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015-2019?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015-2019?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015-2019?
5. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015-2019. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015-2019.

2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015-2019.
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015-2019.
4. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015-2019.
5. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015-2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas, dengan menggunakan data laporan keuangan, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang *good corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komite audit, dan dewan komisaris independen.

2. Aspek Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

a. Bagi Pimpinan Perusahaan/Manajemen

Menjadi bahan pertimbangan bagi pihak manajemen di perusahaan untuk mengetahui pengaruh antara tentang *good corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komite audit, dan dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan.

b. Bagi Investor dan Calon Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan dalam mempertahankan citra perusahaannya dimata investor sehingga, investor dapat mengambil keputusan investasi.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi yang membutuhkan serta menjadi informasi untuk penelitian mengenai pengaruh tentang *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah yang terdaftar di OJK dan diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komite audit, dan dewan komisaris independen.